

**STUDI IMPLEMENTASI PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL  
DALAM PROGRAM RELOKASI PKL DI WILAYAH KECAMATAN  
SEMARANG TIMUR**

**Hendi Yuliyanto  
(D2A 002 034)**

**ABSTRAKSI**

*The informal sector existence in Semarang city almost impossible to shortage and their activity does more influenced to economic region. Informal sector besides as the stabilityzation effort for informal that create opportunities job for himself also have function as dynamisator to motivate other people together for exceed jobless. Interrelated with set of problem about informal sector the local government makes policy product that contains establiment and arragment control in relocation programe, because informal sector all the time handle by expulsion and eviction pattern without clearly solution. This research concerning relocation programe in the eastern Semarang, the variable was choosed is socialization and conscios of society as independent variable and implementation program as dependent variable.*

*Key Word : Relocation, socialization, conscios, implementation.*

**A. PENDAHULUAN**

Kasus PKL ini dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Salah satu faktor yang terkait dengan problema riil PKL adalah konsep informalitas diperkotaan. Konsep tersebut tidak bisa lepas dari dikotomi sektor formal dan sektor informal yang mulai dibicarakan sejak era tahun 70-an. Data BPS tahun 2005 menyebutkan 64,4 persen penduduk bekerja di sektor informal. Di pedesaan sektor informal itu didominasi sektor pertanian (80,6 persen), sementara diperkotaan didominasi oleh sektor perdagangan (42,4 persen).

Di Kecamatan Semarang Timur jumlah pedagang kaki lima sudah terlalu banyak yaitu 2648 yang tersebar di 10 kelurahan. Atau dengan kata lain sebesar 22,8 % dari jumlah keseluruhan PKL yang ada di kota Semarang. Oleh karena itu dengan kondisi yang demikian pemerintah kota Semarang berupaya untuk menertibkan jumlah para pedagang kaki lima melalui program relokasi PKL. Maksud dari program ini adalah untuk memindahkan para pedagang kaki lima yang berjualan ditempat terlarang di wilayah Kecamatan Semarang Timur ke tempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah kota Semarang.

Upaya pengaturan tempat usaha para PKL ini berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 pasal 2 yang berbunyi :

- 1) Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota.
- 2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- 3) Penunjukan dan atau penetapan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain.

Kemudian dalam pasal 3 berbunyi :

“Penunjukan atau penetapan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diatur dengan mempertimbangkan fasilitas PKL yang ada dan tempat kepentingan umum lainnya.”

Awal tahun lalu pemerintah kota Semarang meminta agar mereka segera pindah ke lokasi yang telah disediakan. Hal tersebut sudah di sosialisasikan lewat kecamatan setempat dimana PKL berada untuk memberitahukan kepada para PKL yang berjualan ditempat terlarang akan dilakukan relokasi. Menurut Dinas Pasar mereka telah ditawari tiga lokasi yakni Citandui, Bengkel Militer dan Pasar Waru. Mendapat tawaran tersebut pedagang sebenarnya tidak bersedia menempati ketiga lokasi tersebut yang ditawarkan. Tetapi karena desakan yang terus menerus dari pemerintah kota Semarang akhirnya para pedagang melakukan pengambilan suara

untuk menentukan sikap yang hasilnya mereka sepakat untuk menempati Pasar Waru. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kecamatan bersifat represif sehingga para PKL menempati lokasi baru dengan terpaksa. Berhubungan dengan sosialisasi sangat diperlukan untuk menumbuhkan persepsi yang positif mengenai suatu program dengan demikian akan timbul kesadaran dari diri masyarakat untuk melaksanakan program dengan tidak terpaksa.

Meskipun begitu kenyataannya dilapangan jauh berbeda para pedagang yang terkena program relokasi menempati lokasi yang disediakan pemerintah hanya dalam waktu sebentar saja. Dan banyak yang kembali ketempat lama dimana mereka dulu berjualan. Mereka memprotes pemerintah karena lokasi yang disediakan kurang representatif terutama dalam hal sarana dan prasarana dilokasi baru. Pemerintah kota Semarang menanggapi permintaan dari para pedagang kaki lima dengan membuat janji-janji tetapi kenyataan dilapangan sungguh berbeda. Jika pemerintah kota tidak segera merealisasikan tuntutan yang telah disampaikan pedagang kaki lima dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit bahkan mungkin terjadi konflik. Sampai kini penataan PKL hanya terkesan memindahkan pedagang saja dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada tindak lanjut untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana. Hal ini terkait dengan sosialisasi yang kurang efektif karena informasi yang disampaikan petugas sebatas lokasi baru saja tanpa menjelaskan lebih rinci mengenai kelengkapan infrastruktur yang ada dilokasi baru.

Program relokasi meskipun sudah berjalan sesuai agenda tetapi didalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Berhubungan dengan implementasi program relokasi terdapat hambatan terutama dalam hal sosialisasi program yang disebabkan oleh luasnya wilayah persebaran PKL sedangkan petugas yang dimiliki

untuk mensosialisasikan program relokasi jumlahnya terbatas. Dengan demikian sosialisasi program kurang maksimal.

Pada prinsipnya program relokasi ini bertujuan guna :

1. Terjaminnya usaha masyarakat terutama dalam usaha PKL dengan perijinan.
2. Terjaminnya kebersihan, ketertiban lingkungan dan keamanan karena keterlibatan kepala kelurahan setempat.
3. Terjaminnya pendapatan asli daerah karena adanya kontribusi dari PKL berupa retribusi sewa lahan.

Dengan melihat latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program relokasi pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Semarang Timur. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara sosialisasi program relokasi terhadap implementasi program relokasi PKL ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran PKL terhadap implementasi program relokasi PKL ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara sosialisasi dengan kesadaran PKL terhadap kurang berhasilnya implementasi program relokasi PKL?

### **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaruh antara sosialisasi program relokasi terhadap implementasi program relokasi PKL
- b. Untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran PKL terhadap implementasi program relokasi PKL

- c. Untuk mengetahui pengaruh antara sosialisasi dengan kesadaran PKL terhadap kurang berhasilnya implementasi program relokasi PKL

### **Kerangka Teori**

Berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward dan Van Meter Van Horn salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang dimaksud yaitu komunikasi yang terjadi antar organisasi pelaksana maupun antara organisasi pelaksana dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Dalam penelitian ini penulis hanya menyoroti komunikasi antara organisasi pelaksana kepada masyarakat sebagai obyek dan subyek dari implementasi kebijakan yang dalam komunikasi itu dapat diartikan sebagai sosialisasi. Jadi sosialisasi merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi tentang suatu program atau kebijakan yang akan dilaksanakan pada masyarakat. Jadi dari variabel komunikasi tersebut penulis pilih untuk diturunkan menjadi variabel sosialisasi.

Menurut Sabitier dan Mazmanian dengan Anderson variabel yang mempengaruhi proses implementasi yaitu dukungan atau kesadaran dari masyarakat penerima program. Implementasi akan berhasil jika mendapat dukungan penuh dari masyarakat untuk memperoleh dukungan tersebut perlu ditumbuhkan kesadaran dalam masyarakat mengenai arti penting dan manfaat langsung yang diterima masyarakat dari implementasi kebijakan tersebut supaya mereka memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sosialisasi berkaitan dengan kegiatan penyampaian informasi khususnya yang dilakukan aparat kepada masyarakat mengenai sebuah program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan program tersebut supaya masyarakat dapat meresponya dengan baik. Begitu

juga yang terjadi dalam program relokasi pedagang, apakah karena kurang efektif dalam menyampaikan informasi tentang program yang menyebabkan pelaksanaan program mengalami hambatan. Dalam penelitian ini kegiatan sosialisasi yang dilakukan aparat dari pihak kecamatan kepada para PKL adalah dengan melalui operasi yustisi dan memasang tanda larangan untuk tidak menggelar dagangannya ditempat-tempat yang dilarang.

Soekanto (1986:112 )mendefinisikan kesadaran masyarakat sebagai berikut "Kesadaran masyarakat merupakan kesadaran manusia dan tindak lain terhadapnya dan terhadap berbagai jenis perilaku hal ini mencakup pengakuan terhadap fakta bahwa pihak lain bereaksi terhadap obyek dan situasi yang sama serta dengan perbedaan atau persamaan antara reaksi mereka dan reaksinya".

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap pengembangan kesadaran dapat dimengerti sebagai perubahan tingkah laku yang berkembang dan selalu dinamis. Kesadaran yang tinggi sangat diperlukan dalam keberhasilan implementasi program relokasi pedagang kaki lima ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) yaitu menyoroti besar kecilnya hubungan dan pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel itu meliputi sosialisasi (X1), kesadaran pedagang kaki lima (X2) dan implementasi program relokasi PKL (Y).

### **Populasi Penelitian**

Populasi adalah jumlah keseluruhan analisa yang hendak digeneralisasikan oleh seorang peneliti (Sutrisno Hadi,1993:70). Populasi dapat berupa manusia, benda, organisasi maupun wilayah. Dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan obyek penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah PKL yang berada dalam wilayah Kecamatan Semarang Timur.

### **Sampel Penelitian**

Sampel adalah sebagian dari populasi atau populasi dari unit analisis maupun area, yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Tidak ada ukuran pasti tentang besaran sampel yang dianggap mewakili populasi namun perlu diperhatikan tingkat heterogenitas populasi dan kepentingan unit analisis statistik.

1. Unit analisis, merupakan unit yang akan diteliti atau dianalisa dalam melakukan sebuah penelitian. Seringkali unit penelitian sama dengan unsur sampling yang akan diteiti. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah para pedagang yang terkena program Relokasi PKL ini yaitu terutama para PKL di kecamatan Semarang Timur yang akan direlokasi ke pasar Waru.
2. Sampling frame, merupakan seluruh daftar nama individu atau organisasi yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini yaitu daftar nama pedagang kaki lima yang menjadi sampel penelitian.
3. Sampling Fraction, merupakan pemecahan unsur sebagian sampel menjadi lebih kecil, sehingga masing-masing bagian diwakili oleh beberapa orang. Pemecahan dilakukan untuk mempermudah dalam menentukan ukuran sampel yang akan diambil untuk penelitian.
4. Sampling Size, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sampel sizenya adalah para PKL yang berada di JL Citarum dan JL Pattimura dan JL Kartini yaitu sebanyak 45 orang. Dari 176 pedagang yang akan direlokasi atau sebesar 25,5 % yang akan dijadikan sebagai sampling size dalam penelitian ini. Pengambilan sampel yang

dilakukan oleh peneliti ini berdasarkan pada pendapat Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa "Bila populasi kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sebagai sampel penelitian sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika populasi penelitiannya besar maka dapat diambil 10%-15% atau lebih" (Arikunto,1990:124).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan langsung terhadap obyek penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dari responden.
3. Questioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membagikan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis kepada responden yang selanjutnya responden mengisi dengan menjawab pertanyaan dalam daftar tersebut.
4. Dokumentasi, penelitian terhadap dokumen-dokumen yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

### **Analisa Data**

Data yang telah terkumpul dan diolah, kemudian dianalisis dalam rangka proses pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Analisa data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Analisa data kuantitatif, yaitu analisis data yang berjumlah besar dan sudah diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori hal ini dilakukan guna mengetahui kecenderungan antara variabel yang diteliti.
2. Analisa data kualitatif, yaitu teknik telaah untuk menyimpulkan data yang bersifat kualitatif, dipergunakan untuk data-data yang sulit diukur dengan

angka, yaitu apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, berupa kasus-kasus sehingga dengan analisis tersebut dapat memberikan penafsiran yang baik.

### C. HASIL PENELITIAN

#### Rekapitulasi penilaian variabel Implementasi Kebijakan

Kategori Jawaban	F	%
Rendah (R)	4	8,89
Kurang Tinggi (KT)	29	64,44
Tinggi (T)	10	22,22
Sangat Tinggi (ST)	2	4,44
Jumlah	45	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no 1-12

Berdasar dari Tabel diatas tentang rekapitulasi dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan masih belum maksimal kadar keberhasilannya, hal ini ditunjukkan dari skor rekapitulasi responden yang menjawab rendah 4 (8,89%) responden serta yang responden yang menjawab kurang tinggi 29 (64,44%) responden, secara persentase kadar keberhasilan implementasi belum maksimal.

Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program atau kebijakan dapat dilihat baik buruknya pelaksanaan kebijakannya serta ditambah dengan baik buruknya kebijakan tersebut. Apabila pelaksanaan kebijakan dan kebijakan tersebut baik maka secara otomatis keberhasilan kebijakan tersebut akan baik ataupun sebaliknya.

#### Rekapitulasi penilaian variabel Sosialisasi

Kategori Jawaban	F	%
Rendah (R)	7	15,56
Kurang Tinggi (KT)	23	51,11
Tinggi (T)	13	28,89
Sangat Tinggi (T)	2	4,44
Jumlah	45	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 13-23

Dari Tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa tingkat Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas dalam menyampaikan pesan tentang program relokasi di Kecamatan Semarang Timur mempunyai tingkat Sosialisasi yang kurang berhasil, hal ini ditunjukkan dengan masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas, yaitu masih ada beberapa kekurangan disana sini. Hal tersebut ditunjukkan masih ada responden yang menjawab rendah 7 (15,56 %) responden dan kurang tinggi sebanyak 23 (61,11%) responden.

Pada program relokasi ini harus memerlukan suatu proses sosialisasi yang baik antara petugas dengan kelompok sasaran sehingga kelompok sasaran akan lebih jelas dalam menangkap apa yang disampaikan oleh petugas dalam sosialisasi Program relokasi ini. Hal ini diungkapkan oleh teori Edward III tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi dan salah satunya adalah sosialisasi yang terbentuk dari proses komunikasi. Oleh karena itu dimasa yang akan datang perlu kiranya petugas mensinergiskan langkah bersama sesuai tanggung jawab masing-masing secara proporsional agar dapat memaksimalkan implementasi kebijakan tentang program relokasi ini.

#### Rekapitulasi penilaian variabel Kesadaran PKL

Kategori Jawaban	F	%
Rendah (R)	5	11,11
Kurang Tinggi (KT)	27	60
Tinggi (T)	11	24,44
Sangat Tinggi(T)	2	4,44
Jumlah	45	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 24-32

Berdasar dari Tabel tentang rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa kesadaran yang dimiliki pedagang dalam melaksanakan kebijakan program relokasi masih rendah dan belum cukup bagi terciptanya tujuan kebijakan secara maksimal. Hal ini menurut peneliti terjadi karena beberapa hal yang sudah diutarakan dalam

tabel-tabel berikutnya. Misalnya saja banyak pedagang yang tidak terlalu peduli dengan masalah yang terjadi pada pelaksanaan program.

Keberhasilan suatu program berhubungan dengan dukungan masyarakat terhadap program tersebut. Supaya masyarakat mau mendukung program tersebut maka perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap program tersebut. Dengan adanya kesadaran dari diri para pedagang mengenai program ini diharapkan mereka mau terlibat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam mensukseskan program relokasi PKL ini.

#### D. PEMBAHASAN

##### 1. Analisis Kuantitatif

- a. Hubungan antara variabel Sosialisasi (X1) dengan variabel Implementasi Kebijakan Program Relokasi PKL (Y) di Kecamatan Semarang Timur dapat dilihat dengan deskripsi tabel sebagai berikut

**Tabulasi Silang antara Sosialisasi (X1) dengan Implementasi Kebijakan (Y)**

Implementasi Kebijakan	Sosialisasi				Jumlah
	R	KT	T	ST	
R	<b>2</b>	1	-	-	3
	<b>(28,57%)</b>	(4,54%)	-	-	(6,66%)
KT	5	<b>20</b>	7	-	25
	(71,43%)	<b>(90,90%)</b>	(50%)	-	(55,55%)
T	-	1	<b>7</b>	1	9
	-	(4,54%)	<b>(50%)</b>	(50%)	(20%)
ST	-	-	-	<b>1</b>	1
	-	-	-	<b>(50%)</b>	(2,22%)
Jumlah	7	22	14	2	45
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Berdasar dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang konsisten antara sosialisasi dengan implementasi kebijakan sebesar 30 responden (66,66%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebanyak 2 (28,57%) responden yang mempunyai kategori rendah untuk tingkat sosialisasi dengan implementasi kebijakan program Relokasi PKL.

2. Sebanyak 20 (90,90%) responden yang mempunyai kategori kurang tinggi untuk tingkat sosialisasi dan implementasi program Relokasi PKL.
3. Sebanyak 7 (50%) responden yang mempunyai kategori tinggi untuk tingkat sosialisasi dan implementasi program Relokasi PKL.
4. Sebanyak 1 (50%) responden mempunyai kategori sangat tinggi untuk tingkat sosialisasi dan tingkat implementasi program Relokasi PKL.

Dari tabel silang diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel sosialisasi (X1) dengan implementasi program (Y) atau dengan kata lain bahwa sosialisasi yang baik maka implementasi program akan dapat berhasil dengan baik, atau sebaliknya jika sosialisasi buruk maka akan dapat menghambat keberhasilan implementasi program.

- b. Hubungan antara Kesadaran pedagang (X2) dengan variabel Implementasi Kebijakan (Y) Program Relokasi PKL dapat dilihat dengan deskripsi tabel berikut :

**Tabulasi Silang antara Kesadaran pedagang (X2) dengan Implementasi Kebijakan (Y)**

Implementasi Kebijakan	Kesadaran Pedagang				Jumlah
	R	KT	T	ST	
R	<b>3</b>	-	-	-	3
	<b>(60%)</b>	-	-	-	(6,67%)
KT	2	<b>24</b>	4	2	32
	(40%)	<b>(88,89%)</b>	(36,36%)	(100%)	(71,11%)
T	-	3	<b>6</b>	-	9
	-	(11,11%)	<b>(54,54%)</b>	-	(20%)
ST	-	-	1	-	1
	-	-	(9,09%)	-	(2,22%)
Jumlah	5	27	11	2	45
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Dari tabel IV.2 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang konsisten antara kesadaran pedagang dengan implementasi kebijakan sebesar 33 responden (73,33%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebanyak 3 (60%) responden yang mempunyai kategori rendah untuk tingkat kesadaran pedagang dengan implementasi kebijakan program Relokasi PKL.
2. Sebanyak 24 (88,89%) responden yang mempunyai kategori kurang tinggi untuk tingkat kesadaran pedagang dan implementasi program Relokasi PKL.
3. Sebanyak 6 (54,54%) responden yang mempunyai kategori tinggi untuk tingkat kesadaran pedagang dan implementasi program Relokasi PKL.

Dari tabel silang diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel kesadaran pedagang (X2) dengan implementasi program (Y) atau dengan kata lain bahwa dengan kesadaran pedagang yang tinggi terhadap suatu kebijakan maka implementasi program akan dapat berhasil dengan baik, atau sebaliknya jika kesadaran pedagang rendah maka dapat menghambat keberhasilan implementasi program.

### 3. Analisis Kualitatif.

Di dalam analisa kualitatif ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diolah dengan metode kuantitatif. Bentuk analisis kualitatif yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Di dalam implementasi suatu program, maka sosialisasi harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah ditentukan, ini dapat dilihat dari kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan dalam program Relokasi PKL ini dimana sosialisasi hanya dilakukan oleh pihak kecamatan.
- b. Media yang digunakan kurang beragam dimana hanya menggunakan selebaran dan menyebabkan perbedaan persepsi antara petugas dengan pedagang ditambah dengan kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan

sehingga pedagang tidak terlalu tahu tentang maksud dan tujuan program ini.

- c. Informasi yang disampaikan oleh petugas sampai pada setiap PKL kurang efektif untuk mempengaruhi PKL melaksanakan relokasi. Kerena tindakan individu yang rasional sangat tergantung dari informasi yang dimilikinya, bukan saja informasi untung rugi dalam jangka pendek, melainkan juga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dimasa mendatang (jangka menengah dan jangka panjang). Semakin lengkap informasi yang diperoleh para PKL mengenai untung-rugi, aman-tertib, macam sebagainya semakin mungkin para pedagang menuruti kehendak pemerintah kota untuk menempati daerah-daerah baru yang telah disediakan.
- d. Dalam hal program Relokasi PKL ini diketahui bahwa ada sebagian dari penerima menolak untuk direlokasi disebbkkan tempat relokasi tidak sesuai dengan keinginan pedagang, selain itu masih minimnya sarana dan fasilitas pendukung di tempat lokasi yang baru.
- e. Kesadaran yang dimiliki oleh pedagang dalam melaksanakan program relokasi PKL masih kurang hal ini dapat dilihat pada dukungan yang mereka berikan untuk mensukseskan program ini masih kurang.
- f. Karena tindakan sosial bersifat menular maka tindakan tegas oleh petugas tersebut diatas perlu dijalankan dengan konsekuen. Semisal jika ternyata diketahui bahwa ada pedagang lain yang melakukan perdagangan disalah satu tempat yang dilarang dan mereka tidak meperoleh hukuman seperti yang tersurat dalam kebijakan dan atau peraturan daerah maka pertimbangan rasional bagi para pedagang lainnya ialah mereka akan melakukan tindakan yang sama terhadap pedagang tersebut karena tidak ada

tindakan hukum yang menjerat mereka. Hal ini dilakukan supaya pedagang yang lain tidak ikut-ikutan berjualan ditempat yang dilarang.

- g. Jika suatu perubahan dalam masyarakat dikehendaki, kita harus mulai melakukan perubahan dalam diri sendiri. Kesadaran masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu kebijakan akan sangat mudah mencapai hasil yang diinginkan apabila ditopang oleh kesadaran masyarakat yang tinggi. Dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan dan perlunya perubahan dari dalam masyarakat dengan memberikan pendidikan dalam arti yang luas. Maka dari itu diperlukan suatu pendekatan yang tepat untuk dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama dalam implementasi suatu kebijakan.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi program Relokasi PKL di Kecamatan Semarang Timur kurang optimal ini terkait antara lain :

1. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas tentang masalah relokasi secara mendalam, ini dapat diketahui dari hanya perangkat dari kecamatan yang sering melakukan sosialisasi dan petugas yang berwenang lainnya belum bertindak secara maksimal.
2. Dalam pembentukan kesadaran pedagang untuk meyamakan persepsi ke arah yang dikehendaki kurang berhasil yaitu dapat dilihat dari dukungan pedagang terhadap program yang masih rendah. Usaha untuk meningkatkan partisipasi dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan dan perlunya perubahan dari dalam masyarakat dengan memberikan pendidikan dalam arti yang luas.

3. Penerima program banyak yang menolak untuk menempati lokasi baru yang sudah disediakan oleh pemerintah dikarenakan lokasi baru tempatnya kurang didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai sehingga mampu membuat para pedagang nyaman dan betah untuk berdagang ditempat baru.
4. Diperlukan suatu evaluasi dan monitoring secara terprogram dan dalam rentang waktu yang tidak lama. Walaupun sudah dilakukan evaluasi dan monitoring tetap saja ketidaktepatan sasaran tetap terjadi, ini dikarenakan kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas.

Sosialisasi program yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam implementasi program relokasi PKL kurang maksimal, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan kelemahan komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan seperti :

1. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas terhadap program, ini dapat dilihat dari frekuensi yang dilakukan masih terlalu sedikit sehingga kelompok sasaran tidak terlalu tahu tentang maksud dan tujuan dari program Relokasi PKL ini.
2. Dalam pelaksanaan sosialisasi, komunikasi yang dilakukan tidak bisa dua arah ini dikarenakan bahasa yang digunakan petugas banyak yang tidak dapat dipahami oleh penerima program.
3. Kurang beragamnya media yang digunakan dalam sosialisasi sehingga komunikasi tidak bisa berjalan dengan lancar sehingga isi program tidak bisa diterima oleh sasaran.
4. Tingkat pemahaman pesan yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal penerimaan program sehingga program benar-benar dimengerti oleh kelompok sasaran.

Diketahui bahwa tingkat Kesadaran pedagang dalam pelaksanaan kebijakan program Relokasi PKL ini belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan :

1. Kesadaran para pedagang untuk menerima program Relokai masih kurang, karena itu program agak terhambat dalam pelaksanaannya.
2. Dalam hal keinginan untuk mensukseskan program masih sedikit jumlah yang orang yang mendukung pelaksanaan program ini, hal ini terjadi karena

pendekatan yang digunakan petugas kurang sesuai dengan kondisi atau keadaan dilapangan.

3. Dalam penanganan masalah petugas masih kurang baik sehingga masyarakat merasa tidak puas terhadap kinerja yang dilakukan oleh petugas, sehingga banyak masalah yang dialami oleh penerima program tidak diungkapkan kepada petugas.

### **Saran-Saran**

- a) Sosialisasi tentang program harus melalui komunikasi yang baik dan juga komunikasi yang terjadi harus dua arah antara petugas dengan penerima program. Selain itu frekuensi sosialisasi harus ditambah intensitasnya sehingga pedagang akan semakin jelas. Untuk memudahkan sosialisasi ini dalam penyampaiannya lebih baik menggunakan bahasa kehidupan sehari-hari seperti bahasa jawa sehingga masyarakat merasa lebih enak untuk mendengarkan dan memberikan tanggapan terhadap program sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk penambahan frekuensi sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya dapat dilakukan dengan pembentukan kelompok-kelompok pedagang.
- b) Perlu ditingkatkan efektivitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah kota sampai pada setiap PKL. Karena tindakan individu yang rasional sangat tergantung dari informasi yang dimilikinya, bukan saja informasi untung rugi dalam jangka pendek, melainkan juga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dimasa mendatang (jangka menengah dan jangka panjang). Semakin lengkap informasi yang diperoleh para PKL mengenai untung-rugi, aman-tertib, dan sebagainya semakin mungkin para pedagang menuruti kehendak pemerintah kota untuk menempati daerah-daerah baru yang telah disediakan.

- c) Dalam masalah alat untuk sosialisasi ditambah keberagamannya sehingga pedagang akan lebih tahu tentang tujuan dan maksud program dan juga kejelasan dari program. Penambahan sarana ini dapat dilakukan dengan cara pembuatan spanduk-spanduk, iklan di radio, buku-buku saku dan lainnya yang sekiranya informasi ini dapat diketahui oleh masyarakat luas.
- d) Kesadaran dari pedagang perlu ditingkatkan dengan cara memberikan pembinaan terhadap para pedagang, karena pedagang adalah sasaran dari program maka dukungan dan partisipasi dari pedagang sangat berarti terhadap keberhasilan implementasi. Ini dimaksudkan agar pedagang bersedia mensukseskan program relokasi ini dan akhirnya program ini akan tepat pada tujuan yang diharapkan.
- e) Dibutuhkan sebuah institusi publik yang dapat dengan jelas memberikan informasi mengenai keuntungan dan resiko dari setiap tindakan dan perilaku apabila mereka menuruti atau bahkan melakukan tindak pelanggaran. Institusi ini pula yang kemudian melakukan kontrol baik penyuluhan maupun tindakan terhadap pelanggaran secara rutin pada daerah-daerah yang tidak diperbolehkan untuk PKL berdagang. Perspektif ini bertitik pangkal pada hipotesis jika setiap pelanggaran terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mempunyai resiko yang tinggi maka perilaku individu akan cenderung memilih untuk berdisiplin walaupun ia tidak memahami atau tidak setuju dengan nilai-nilai disiplin yang mendasarinya.
- f) Karena tindakan sosial bersifat menular maka tindakan tegas oleh petugas perlu dijalankan dengan konsekuen. Semisal jika ternyata diketahui bahwa ada pedagang lain yang melakukan perdagangan disalah satu tempat yang

dilarang dan mereka tidak memperoleh hukuman seperti yang tersurat dalam kebijakan dan atau peraturan daerah maka pertimbangan rasional bagi para pedagang lainnya ialah mereka akan melakukan tindakan yang sama terhadap pedagang tersebut karena tidak ada tindakan hukum yang menjerat mereka. Oleh karena itu perilaku yang bersifat kontingensi tersebut perlu dieliminasi atau bahkan dihapus dengan cara menindak tegas tanpa pandang bulu.

- g) Pemerintah kota Semarang perlu melengkapi berbagai fasilitas yang dirasa masih kurang seperti toilet yang jumlahnya kurang, selain itu perbaikan sarana jalan yang perlu ditinggikan supaya tidak banjir ketika musim hujan tiba. Dengan sudah tersedianya berbagai fasilitas pendukung di lokasi baru kemungkinan para pedagang akan bersedia untuk menempati lokasi baru yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut dan tidak akan kembali ke lokasi lama.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Prof. Dr. Suharsami. 2002. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan dan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Bintoro Tjokroamidjojo. 1985. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : LP3ES.

Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Korten, David C. & Syhrir. 1990. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Nawawi, H. Hadari. 1995. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Ndraha, Talizuduhu. 1997. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta : Rineka Cipta.

Ramli, Rusli. 1992. Sektor Informal Perkotaan. Jakarta : Ind-Hill-co.

Rianto, Adi & Prasadja, Heru. 1993. Langkah-langkah Penelitian Sosial. Jakarta : Arcan.

Soekanto, Soerjono. 1993. Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press.

Solichin Abdul Wahab, 2001. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Subarsono, Drs. AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori Dan Aplikasi. Jakarta : Pustaka Pelajar.

Sutrisno Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Jakarta : Kanisius.

Susanto, & Astrid, S. 1997. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Bandung : Bina Cipta.

Thoha, Miftah. 1992. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yuwono, Teguh dan Badjuri. 2002. Kebijakan Publik : Konsep Dan Strategi. Semarang : Universitas Diponegoro.

#### Non-Buku

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

[www. Semarang.go.id](http://www.Semarang.go.id)

Suara Semarang Juni 2006 halaman 1-5.